



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 25);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 166

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 166 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;

- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. 5892909 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : dlh@bandungkab.go.id.
Website : <http://www.lingkunganhidup.bandungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800/Kep.486-DLH/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja;
- c. bahwa terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun berjalan sehingga diperlukan pergeseran, penghapusan, dan penambahan anggaran sub kegiatan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutahirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
19. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati bandung Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;
- e. melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tepat waktu;
- g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 05 Mei 2025

Ditetapkan : di Soreang
Pada tanggal: 05 Mei 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG



ASEP KUSUMAH, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720105 199101 1 003

LAMPIRAN I
NOMOR : 800/Kep.486-DLH/2024
TANGGAL : 05 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANDUNG

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	Anggota
5.	Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan	Anggota
8.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Kepala UPTD Pengangkutan Wilayah Baleendah	Anggota
10.	Kepala UPTD Pengangkutan Wilayah Ciparay	Anggota
11.	Kepala UPTD Pengangkutan Wilayah Rancaekek	Anggota
12.	Kepala UPTD Pengangkutan Wilayah Soreang	Anggota
13.	Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Anggota
14.	Analisis Perencanaan Anggaran	Kesekretariatan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG



ASEP KUSUMAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG PERATURAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, Alhamdulillah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja DLH Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam jangka satu tahun, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya. Penyusunan Perubahan Renja mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja DLH tahun 2025 disusun dengan melakukan evaluasi kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan ke-1 tahun 2025 dan evaluasi terhadap pencapaian Renja DLH tahun 2024 .

Tersusunnya Perubahan Renja DLH Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dan rencana kegiatan prioritas DLH sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan DLH.

Akhir kata, Kami haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renja DLH Tahun 2025.

Soreang, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG



ASEP KUSUMAH, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720105 199101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum.....2

 1.3 Maksud dan Tujuan4

 1.4 Sistematika Penulisan4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah.....6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah19

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah35

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional62

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....66

 3.3 Program dan Kegiatan67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 97

 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....97

BAB V PENUTUP 117

 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja117

 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....117

 5.3 Rencana Tindak Lanjut.....118

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah..... 12

Tabel 2. 2 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 21

Tabel 2. 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 22

Tabel 2. 4 Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 s.d 2024..... 28

Tabel 2. 5 Target, Realisasi dan Capaian indikator Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH Tahun 2024 30

Tabel 2. 6 Nilai Perkomponen AKIP DLH Tahun 2020-2023 31

Tabel 2. 7 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi 36

Tabel 2. 8 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 39

Tabel 2. 9 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 47

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 66

Tabel 3. 2 Rumusan Program berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 68

Tabel 3. 3 Rumusan Program berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 71

Tabel 3. 4 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 73

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup..... 20

Gambar 2. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKLH 2024..... 21

Gambar 2. 3 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Air 24

Gambar 2. 4 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Udara 25

Gambar 2. 5 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lahan..... 26

Gambar 2. 6 Kegiatan Strategis Pencapaian IKLH 2024 melalui Peningkatan Indeks IKA & IKU 27

Gambar 2. 7 Kegiatan Strategis Pencapaian IKLH 2024 melalui Peningkatan Indeks Kualitas Lahan 27

Gambar 2. 8 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2024 28

Gambar 2. 9 Volume Pengurangan dan Penanganan Sampah 29

Gambar 2. 10 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Pengurangan Ketergantungan ke TPA Tahun 2025 29

Gambar 2. 11 Target, Realisasi dan Capaian AKIP DLH Tahun 2017 s.d 2024 30

Gambar 2. 12 Penghargaan Peringkat I SAKIP Tahun 2024 31

Gambar 2. 13 Populasi dan Responden SKM Tahun 2019-2024 32

Gambar 2. 14 Jumlah Layanan Pada DLH Tahun 2019-2024 32

Gambar 2. 15 Perkembangan Nilai IKM Tahun 2019-2024 33

Gambar 2. 16 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat..... 33

Gambar 2. 17 Target dan Realisasi Capaian Persentase Aser dalam Kondisi Baik 34

Gambar 2. 18 Isu-isu penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 46

Gambar 3. 1 Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025-2029 63

Gambar 3. 2 *Logical Frame Work* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung..... 65

Gambar 3. 3 Posisi Pilar terkait Lingkungan Hidup dalam TPB 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan dokumen Renja Perubahan DLH ini mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 serta tahun berjalan 2025.

Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintahan, serta berperan penting dalam setiap kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan program dan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

DLH Kabupaten Bandung memandang perlu melakukan Renja Perubahan Tahun 2025. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Renja Perubahan Tahun 2025, yaitu:

- a. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025;
- b. Penyesuaian target indikator capaian kinerja utama Tahun 2025;
- c. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun berjalan sehingga diperlukan pergeseran, penghapusan dan penambahan anggaran subkegiatan;
- d. Hasil evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025.

Hal yang mendasari Renja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berjalan. RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perubahan DLH Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

Renja Perubahan DLH Tahun 2025 merupakan implementasi tahun keempat dari Renstra Perubahan DLH Tahun 2021 – 2026, dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bandung.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 14) Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
- 15) Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
- 16) Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

18) Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah memberikan pedoman bagi setiap unit kerja dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan merupakan basis data untuk merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah selanjutnya. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari dokumen Renstra Perubahan disusun dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 dengan menetapkan 10 (sepuluh) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 50 (lima) subkegiatan dengan anggaran Rp. 114.551.641.397,00 untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DAU)
 - b. Subkegiatan Koordinasi dengan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Subkegiatan Koordinasi dengan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Subkegiatan Koordinasi dengan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Subkegiatan Koordinasi dengan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - h. Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - i. Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a. Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 2.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - b. Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3.3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi
- 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 4.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. SubKegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokasi dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- 6.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokasi, Pengetahuan Tradisional dan Hal MHA yang Terkait PPLH
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 8.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 9.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Persampahan
 - 10.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - a. Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- b. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c. Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- d. Subkegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
- e. Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
- f. Subkegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian terhadap Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung

Nama PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025					
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10		11=(5+7+10)		12=(11/4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	78,25	Poin	84,10	Poin	77,75	Poin	86,25	Poin	110,93%	78	Poin	0	Poin	0	Poin	0,00%
		Nilai IKM	78,75	Poin	84,19	Poin	78	Poin	86,91	Poin	111,42%	78,25	Poin	91	Poin	91	Poin	25,00%
		Nilai BMD	92%	%	92%	%	92%	%	94%	%	102,17%	92	%	0	%	0	%	0,00%
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100,00%	1	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 5	Dokumen Kegiatan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	20	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00%	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00%	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	25,00%
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100	Data	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Data	0	Data	0	Data	25,00%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195	orang/bulan	184	orang/bulan	200	orang/bulan	180	orang/bulan	90,00%	200	orang/bulan	180	orang/bulan	180	orang/bulan	25,00%
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140	Laporan	19	Laporan	28	Laporan	28	Laporan	100,00%	28	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	10,71%
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	0	Paket	0	Paket	25,00%
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	0	Paket	0	Paket	25,00%
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	0	Paket	0	Paket	25,00%
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	0	Paket	0	Paket	25,00%
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	20,00%
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	15	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	13,33%
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Laporan	20	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	100,00%	25	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	16,00%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%

2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	25,00%
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	25,00%
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391	Laporan	368	Laporan	368	Laporan	368	Laporan	100,00%	391	Laporan	383	Laporan	383	Laporan	25,00%
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	92%	%	92%	%	92%	%	94%	%	102,17%	0	%	0,00%	%	0	%	0,00%
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	1	Unit	0	Unit	0	Unit	25,00%
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122	Unit	122	Unit	122	Unit	122	Unit	100,00%	122	Unit	10	Unit	10	Unit	8,20%
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	3	Unit	29	Unit	29	Unit	100,00%	29	Unit	5	Unit	5	Unit	17,24%
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00%	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%
2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,12	Poin	3,44	Poin	3,10	Poin	3,59	Poin	115,81%	3,11	Poin	3,76	Poin	3,76	Poin	25,00%
2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00%	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	25,00%
2.11.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya insentif KDH WKDH	24	Orang/Bulan	N/A	N/A	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	100,00%	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	25,00%
2.11.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/Bulan	N/A	N/A	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	100,00%	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	25,00%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS)	80%	%	100%	%	100%	%	100,00%	%	100,00%	70	%	15,00%	%	15,00%	%	15,00%
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH	100%	%	100%	%	100%	%	100,00%	%	100,00%	100	%	0,00%	%	0	%	15,00%
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	15,00%
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	15,00%

		mengakomodir arahan RPPLH Provinsi																
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas air	100%	%	26,7%	%	47%	%	46,67%	%	100,00%		%		%	0	%	25,00%
		Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara	100%	%	16,1%	%	25,80%	%	25,80%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
		Indeks Kualitas Lahan	49,38	Poin	49,91	Poin	49,38	Poin	49,77	Poin	100,79%	49,37	Poin	0	Poin	0	Poin	0,00%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	25	Dokumen	4	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	13856	Dokumen	3358	Dokumen	2612	Dokumen	2496	Dokumen	95,56%	2743	Dokumen	528	Dokumen	528	Dokumen	19,25%
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	20	Lokasi	20	Lokasi	34	Lokasi	34	Lokasi	100,00%	34	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	25,00%
		Jumlah lokasi titik pantau kualitas udara	20	Lokasi	20	Lokasi	27	Lokasi	27	Lokasi	100,00%	27	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	25,00%
		Jumlah Lokasi Pencemaran yang Ditanggulangi	3	Lokasi	2	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100,00%	1	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	25,00%
		Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan	2	Dokumen	1	Dokumen												
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00%	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	25,00%
2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	5	Lokasi	2	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100,00%	1	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	25,00%
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah area tertanami (ha)	216,6	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	100,00%	4	Ha	0	Ha	0	Ha	25,00%
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	170,6	Ha		Ha	4	Ha	4	Ha	100,00%	4	Ha	0	Ha	0	Ha	25,00%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengembangan Taman Kehati	100%	%	15%	%	15%	%	15%	%	100,00%	87,50%	%	15%	%	15%	%	25,00%
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam	100%	%	15%	%	15%	%	15%	%	100,00%	90,00%	%	15%	%	15%	%	25,00%
		Persentase infrastruktur terbangun	100%	%	15%	%	15%	%	15%	%	100,00%		%		%	0	%	25,00%

2.11.04.2.01.0002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	1	Unit	0	Unit	0	Unit	25,00%
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,5	Ha	3	Ha	78,23	Ha	78,23	Ha	100,00%	18,5	Ha	0	Ha	0	Ha	25,00%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi	100%	%	73%	%	73%	%	73%	%	100,00%	100	%	20,67%	%	20,67%	%	33,98%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	2	Dokumen	100%	%	100%	%	162%	%	162,00%	1	%	0	%	0	%	33,98%
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	385	Dokumen	45	Dokumen	35	Dokumen	77	Dokumen	100,00%	40	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	62,50%
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	120	Badan Usaha	1	Laporan	1	Badan Usaha	62	Badan Usaha	100,00%	110	Badan Usaha	6	Badan Usaha	6	Badan Usaha	5,45%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial	100%	%	2%	%	5%	%	5%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	25,00%
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Desa Berbudaya Lingkungan	66,10%	%	20%	%	17,80%	%	17,80%	%	100,00%	62,5	%	15,00%	%	15,00%	%	25,00%

	PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	176	Laporan	4	Laporan	52	Laporan	52	Laporan	100,00%	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	10,00%
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	17	Dokumen	4	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	25,00%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	54%	%	71%	%	72,00%	%	72,00%	%	100,00%	52	%	16,25%	%	16,25%	%	25,00%
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	85	Penghargaan	12	Lokasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	80	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	85	Entitas	40	Entitas	40	Entitas	40	Entitas	100,00%	80	Entitas	13	Entitas	13	Entitas	16,25%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100%	%	100%	%	100,00%	%	100,00%	%	100,00%	100	%	25,00%	%	25,00%	%	25,00%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan pengaduan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	25,00%
		Jumlah laporan hasil penegakan hukum	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00%	1	laporan	0	laporan	0	laporan	25,00%
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	220	Pengaduan	1	Pengaduan	20	Pengaduan	36	Pengaduan	180,00%	50	Pengaduan	15	Pengaduan	15	Pengaduan	30,00%
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	100	Perkara	1	Perkara	1	Perkara	20	Perkara	100,00%	20	Perkara	0	Perkara	0	Perkara	0,00%

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	100,00 %	%	81,09%	%	87,15%	%	87,65%	%	100,57%	93,42	%	66,70%	%	66,70%	%	66,70%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah	68,03%	%	81,09%	%	59,31%	%	36,88%	%	62,18%	63,7	%	40,50%	%	40,50%	%	40,50%
		Persentase Pengurangan Volume Sampah	31,97%	%			27,84%	%	50,77%	%	182,36%	29,72	%	26,20%	%	26,20%	%	26,20%
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100	Kelompok	10	Kelompok	20	Kelompok	20	Kelompok	100,00%	20	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0,00%
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	25	Dokumen	1	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	30	Unit	106	Unit	12	Unit	12	Unit	100,00%	8	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	17	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	25,00%
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	477433,5	Ton	83871	Ton	72500	Ton	80136	Ton	110,53%	43800	Ton	22750	Ton	22750,44	Ton	51,94%
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	71307	Ton	2	Laporan	5307	Ton	5307	Ton	100,00%	33000	Ton	0	Ton	0	Ton	0,00%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara umum mencapai 100%. Namun jika capaian kinerja tersebut dibandingkan terhadap target akhir Renstra maka capaian kinerja sebagian masih dibawah 100% dan sebagian telah mencapai 100%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Adanya kebijakan anggaran parsial sehingga mempengaruhi pada penatausahaan keuangan;
2. Ketentuan komposisi cash budget semester I sebesar 50% dan semester II sebesar 50%, yang mana pada semester I memfokuskan pada belanja wajib mengikat, sehingga kegiatan lain dilaksanakan pada semester II;
3. Pengadaan barang/jasa dalam proses persiapan dan administrasi serta kegiatan Fisik dilaksanakan mulai Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 maka diperlukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

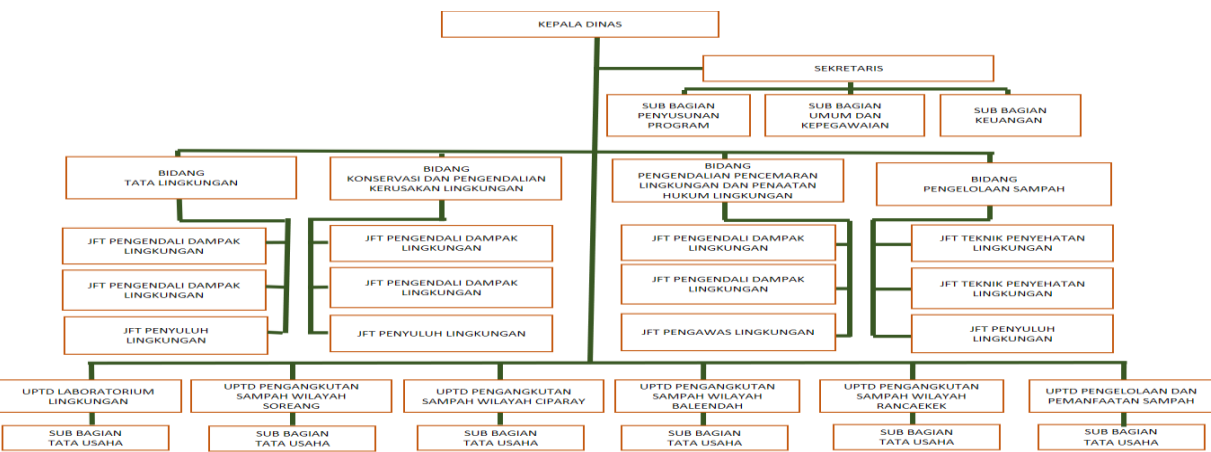
Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah, dibentuk 4 Bidang dan 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas meliputi:

- 1. Bidang Tata Lingkungan
- 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Hukum Lingkungan
- 3. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- 4. Bidang Pengelolaan Sampah
- 5. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang
- 6. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek
- 7. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah
- 8. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay
- 9. UPTD Labolarorium Lingkungan
- 10. UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Struktur organisasi DLH ditunjukkan Gambar berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dilihat pada Tabel TC. 30 dibawah ini.

Target kinerja yang ditetapkan Tahun 2024, dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan Nasional yang lebih diarahkan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, kerangka waktu dan kemampuan pelaksanaan pekerjaaa sampai dengan akhir Tahun 2024 serta pendapatan dan ketersediaan anggaran daerah. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH Tahun 2024 meningkat 3,29 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 56,58 poin dan pada tahun 2024 sebesar 59,87 poin. Kondisi IKLH Kabupaten Bandung berpredikat **cukup** karena berada pada rentang $50 \leq x \leq 70$, yang artinya kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung berada pada kategori sedang tidak terlalu baik namun tidak terlalu buruk, secara umum menunjukkan bahwa kualitas air, udara dan lahan masih dapat mendukung kehidupan yang baik namun ada factor yang perlu diperbaiki/ditingkatkan

Tabel 2.2 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tahun	IKA			IKU			IKL			IKLH		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2017	19	19	100,0%	72	72	100,0%	49	49	100,00%	46,9	54,78	116,80%
2018	21	26,3	125,2%	75	75,19	100,3%	49,06	49,07	100,02%	48,421	50,08	103,43%
2019	23	30,3	131,7%	77	76,4	99,2%	49,13	49,21	100,16%	49,65	51,69	104,11%
2020	24	29,67	123,6%	78	78,1	100,1%	49,2	49,24	100,08%	51,39	53,57	104,24%
2021	25	32	128,0%	80	78,9	98,6%	49,27	49,28	100,02%	52,59	54,78	104,16%
2022	29	34	117,2%	78	80,1	102,7%	49,28	49,35	100,14%	53,29	56,03	105,14%
2023	29,5	35	118,6%	78,5	80,5	102,5%	49,3	49,41	100,22%	53,68	56,58	105,40%
2024		42,67			81,3			49,77		56,05	59,87	106,82%



Gambar 2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKLH 2024

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Perubahan Indikator *	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)
1	Nilai akuntabilitas kinerja			77,5 Poin	77,75 Poin	78 Poin	78,25 Poin	84,10 Poin	86,25 Poin		N/A	N/A
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat			77,75 Poin	78 Poin	78,25 Poin	78,75 Poin	84,19 Poin	86,91 Poin		N/A	N/A
3	Persentase Aset dalam kondisi baik			92%	92%	92%	92%	93,00%	94,00%		N/A	N/A
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			53,29 Poin	53,68 Poin	54,28 Poin	56,07 Poin	56,58 Poin	59,87 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,73	63,98
										Penurunan Emisi GRK	456.335,50	515.590,09
5	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup			98,30%	98,90%	99,40%	100,00%	105,40%	106,82%	Indeks Kualitas Udara	61,2	61,6
										Indeks Kualitas Air	65,64	65,84
										Indeks Kualitas Lahan	65,11	65,18
6	Persentase Sampah Yang Terkelola			80,93	87,15	93%	99,69%	81,09%	87,65	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	17,87%	22,69%
7	Persentase Pengurangan Sampah			26,08%	27,84	29,72%	31,66%	50,68%	50,77%			

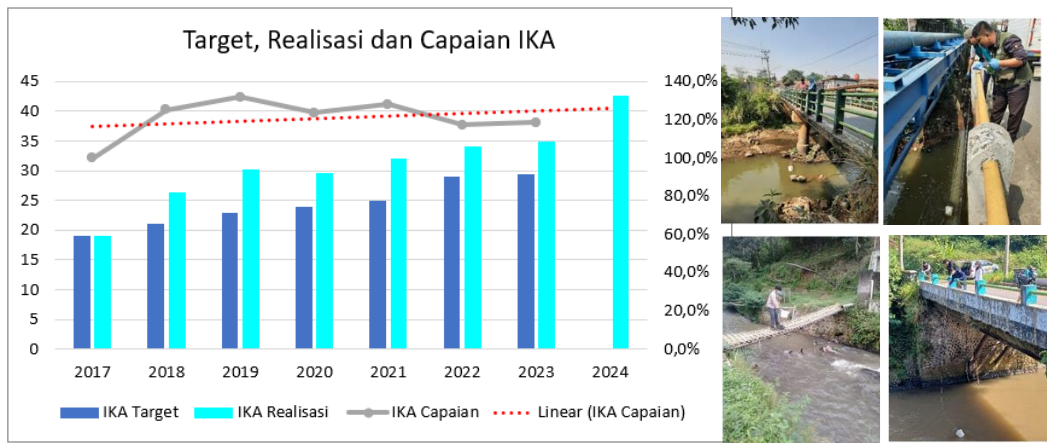
No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Perubahan Indikator *	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)
8	Persentase Penanganan Sampah			54,85%	59,31%	63,70%	68,03%	30,41%	36,88%	Persentase Proporsi Rumah Tanggah dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	44,51%	53,43%

* Sesuai Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra DLH Tahun 2025-2029

Nilai IKLH diperoleh dari 3 komponen pembentuknya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berikut penjelasan 3 komponen tersebut .

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas air diperoleh dengan melakukan sampling 3 kali yang mewakili kondisi pada musim penghujan, musim pancaroba dan musim kemarau, pada 20 lokasi sungai di Kabupaten Bandung.



Gambar 2.3 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Air

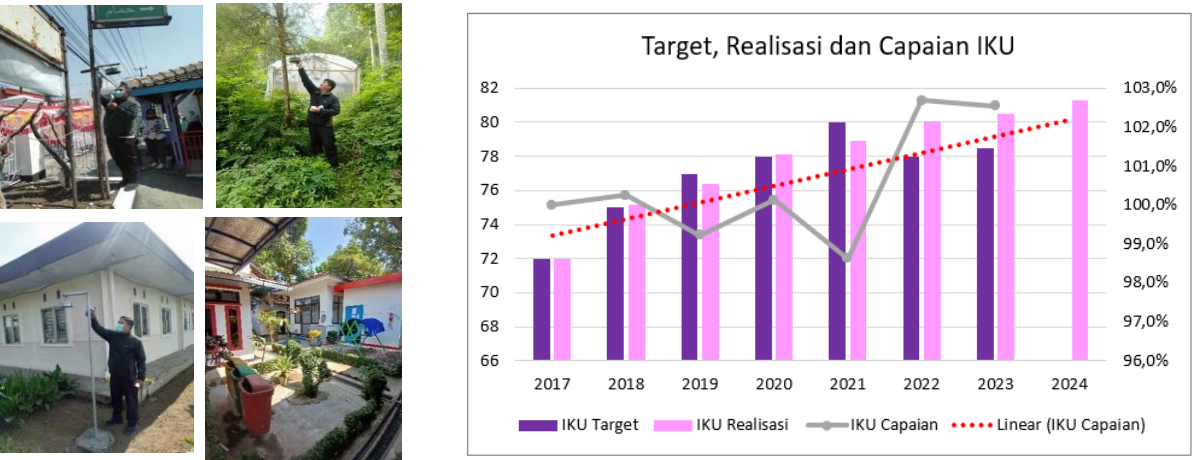
Indeks kualitas air Tahun 2024 meningkat 7,67 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 35 dan 2024 sebesar 42,67 poin. Mengacu pada Permen LHK No.27 Tahun 2021, kondisi tersebut masih terkategori **Kurang** karena berada pada angka rentang $25 \leq x \leq 50$, sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk pengendalian pencemaran air.

b. Indeks Kualitas Udara

Guna perhitungan Indeks Kualitas Udara, Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan metode passive sampler dengan periode pemantauan 2 kali dalam 1 tahun. Lokasi pantau yang dipilih, mengacu pada Ketentuan teknis pemantauan kualitas udara ambien sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemantauan Kualitas Udara Ambien, mempertimbangkan sumber-sumber pencemaran udara yang ada di wilayah Kabupaten Bandung seperti permukiman, komersial/perkantoran, area transportasi dan area industri.

Indeks kualitas udara Tahun 2024 meningkat 0,8 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 sebesar 80,5 poin dan Tahun 2024 sebesar 81,3 poin. Nilai tersebut menunjukkan status kualitas udara Kabupaten Bandung berada pada kondisi **baik** karena berada pada

angkaangka rentang $70 \leq x \leq 90$. Namun tetap diperlukan upaya-upaya mempertahankan kondisi kualitas udara tersebut.



Gambar 2.4 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Udara

c. Indeks Kualitas Lahan

IKL (Indeks Kualitas Lahan) merupakan agregat dari unsur “luas tutupan vegetasi hutan” dan “luas tutupan vegetasi non hutan” dibandingkan dengan luas total wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bidang Kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Perhutani KPH Bandung Utara dan Bandung Selatan untuk hutan lindung dan hutan produksi; serta BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Wilayah Jawa Barat KLHK untuk hutan konservasi.

Perhitungan untuk setiap tutupan lahan mengacu pada digitasi peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2026 yang diverifikasi dengan digitasi melalui GPS, serta Peta Digital “tutupan vegetasi lahan non hutan” wilayah Kabupaten Bandung tahun 2017 dan Peta Digital “tutupan vegetasi hutan” Kabupaten Bandung Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Indeks kualitas lahan Tahun 2024 meningkat 0,36 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 sebesar 49,41 poin dan pada Tahun 2024 sebesar 49,77 poin. Status IKL/IKTL Kabupaten Bandung berada pada kondisi ***kurang*** karena berada pada angka rentang $25 \leq x \leq 50$ sehingga masih dibutuhkan upaya peningkatan tutupan lahan dengan melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman serbaguna mengacu pada jenis bentang alam dan tipe vegetasi.



Gambar 2.5 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lahan

Keberhasilan peningkatan nilai IKA dan IKU didukung oleh pelaksanaan 8 program, 11 kegiatan dan 17 subkegiatan pada Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Hukum Lingkungan, serta Bidang Konservasi dan Penataan Hukum Lingkungan.



Gambar 2.6 Kegiatan Strategis Pencapaian IKLH 2024 melalui Peningkatan Indeks IKA & IKU



Gambar 2.7 Kegiatan Strategis Pencapaian IKLH 2024 melalui Peningkatan Indeks Kualitas Lahan

2. Meningkatnya Prosentase Sampah Yang Dikelola

Persentase volume sampah yang dikelola meningkat 6,56% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 81,09% dan tahun 2024 sebesar 87,65%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase volume sampah yang dikelola **meningkat** sebesar 0,4% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,2% dan pada tahun 2024 sebesar 100,6%

Sedangkan pada indikator sasaran strategis, persentase penanganan sampah sampah **meningkat** 6,47% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun

2023 sebesar 30,41% dan tahun 2024 sebesar 36,88% demikian juga % pengurangan sampah **meningkat** 0,09% dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 50,68% dan Tahun 2024 sebesar 50,77%.

Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase penanganan sampah Tahun 2024 jika dibandingkan Tahun 2023 adalah **meningkat** sebesar 6,74% sedangkan persentase pengurangan sampah menurun 11,97%.



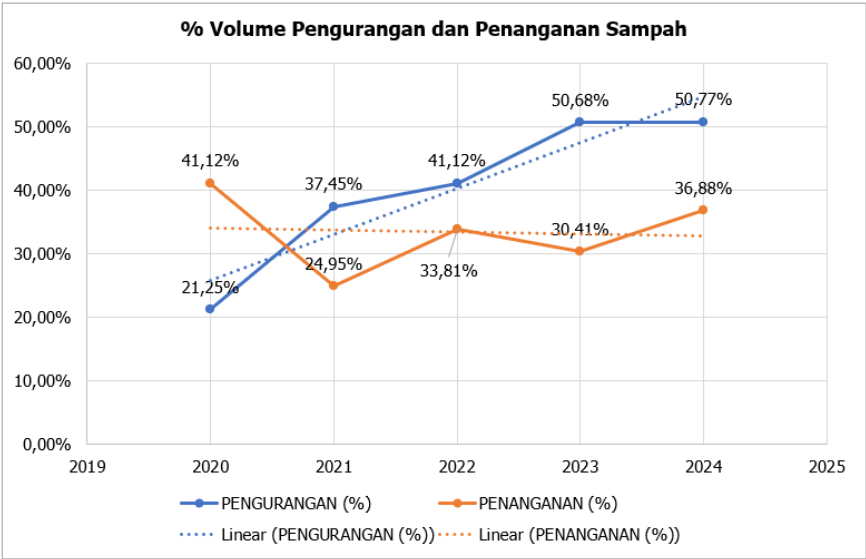
Gambar 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2024

Persentase volume pengurangan dan penanganan sampah Tahun 2020 s.d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut. Dari tabel dan gambar tersebut nampak bahwa trend pengurangan sampah mengalami peningkatan sedangkan trend penanganan sampah mengalami penurunan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak sebanding dengan peningkatan jumlah sarana pengangkutan sampah dan kondisi truk pengangkutan sampah yang menurun setiap tahunnya.

Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 s.d 2024

Tabel 2.4 Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 s.d 2024

NO	TAHUN	PENGURANGAN (%)	PENANGANAN (%)	PENGELOLAAN (%)
1	2020	21,25%	41,12%	62,37%
2	2021	37,45%	24,95%	62,40%
3	2022	41,12%	33,81%	74,93%
4	2023	50,68%	30,41%	81,09%
5	2024	50,77%	36,88%	87,65%



Gambar 2.9 Volume Pengurangan dan Penanganan Sampah

Peningkatan capaian kinerja pengelolaan sampah didukung oleh pelaksanaan 1 program, 1 kegiatan dan 9 subkegiatan dengan 12 upaya pengurangan ketergantungan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah sebagai berikut.



Gambar 2.10 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Pengurangan Ketergantungan ke TPA Tahun 2025

3. **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup**

Terdapat 3 indikator kinerja yang dapat menggambarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan persentase asset dalam kondisi baik. Tabel berikut menunjukkan Target, Realisasi dan Capaian indikator sasaran strategis meningkatnya kinerja Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH Tahun 2024.

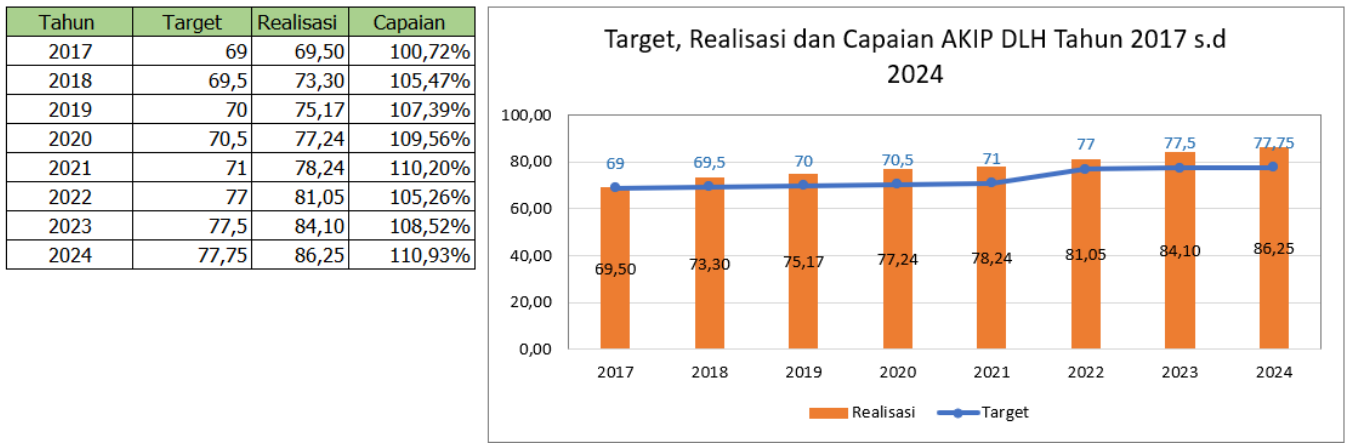
Tabel 2.5 Target, Realisasi dan Capaian indikator Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Nilai AKIP	77,75 (BB)	86,25 (A)	110,93%
Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai AKIP	77,75 (BB)	86,25 (A)	110,93%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	86,91	111,42%
	Persentase Asset dalam Kondisi Baik	92%	94,00%	102,17%

a. **Nilai AKIP**

Nilai AKIP DLH Kabupaten Bandung **meningkat** 2,15 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 84,10 poin dan tahun 2024 sebesar 86,25 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Nilai AKIP **meningkat** sebesar 2,41% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 108,52% dan pada tahun 2024 sebesar 110,93%.

Berikut adalah Target dan realisasi AKIP DLH tahun 2017 s.d 2024 yang ditunjukkan oleh Tabel dan Gambar berikut, yang realisasi kinerjanya menunjukkan tren peningkatan pada setiap tahunnya.



Gambar 2.11 Target, Realisasi dan Capaian AKIP DLH Tahun 2017 s.d 2024

Sejak Tahun 2022, terjadi perubahan komponen/kriteria penilaian, dari 5 komponen menjadi 4 komponen sehingga terjadi perubahan bobot, dimana porsi bobot terbesar adalah pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi internal. Namun demikian, nilai AKIP DLH Tahun 2023 meningkat 3,05 poin dari perolehan Tahun 2022 atau meningkat 6,6 poin dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Adapun Nilai perkomponen AKIP DLH dari Tahun 2020-2023 ditunjukkan oleh Tabel berikut.

Tabel 2.6 Nilai Perkomponen AKIP DLH Tahun 2020-2023

No	Komponen/Kriteria	Bobot		Nilai Akuntabilitas Kinerja				
		2020-2021	2022 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	30	24,98	24,98	25,50	26,10	27,00
2	Pengukuran Kinerja	25	30	20,63	20,94	25,20	24,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	15	11,86	12,54	11,10	12,75	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	6,06	6,48	19,25	21,25	22,50
5	Capaian Kinerja	20	-	13,72	13,72	-	-	-
Jumlah		100	100	77,25	78,66	81,05	84,10	86,26
Kategori Nilai				BB	BB	A	A	A

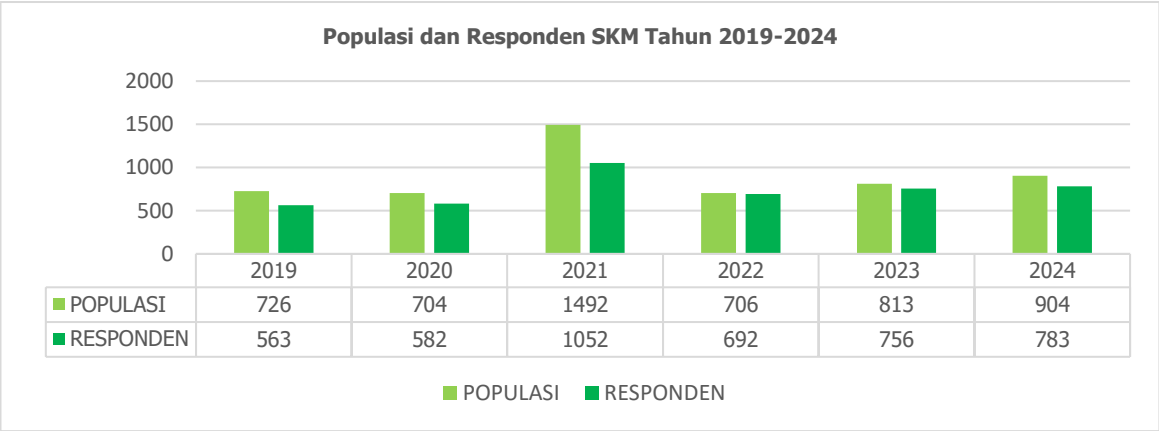
Perolehan nilai AKIP DLH, menjadikan DLH sebagai satu perangkat daerah dengan nilai AKIP tertinggi sehingga memperoleh penghargaan di Tingkat Kabupaten. Berikut 10 besar Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP tertinggi.



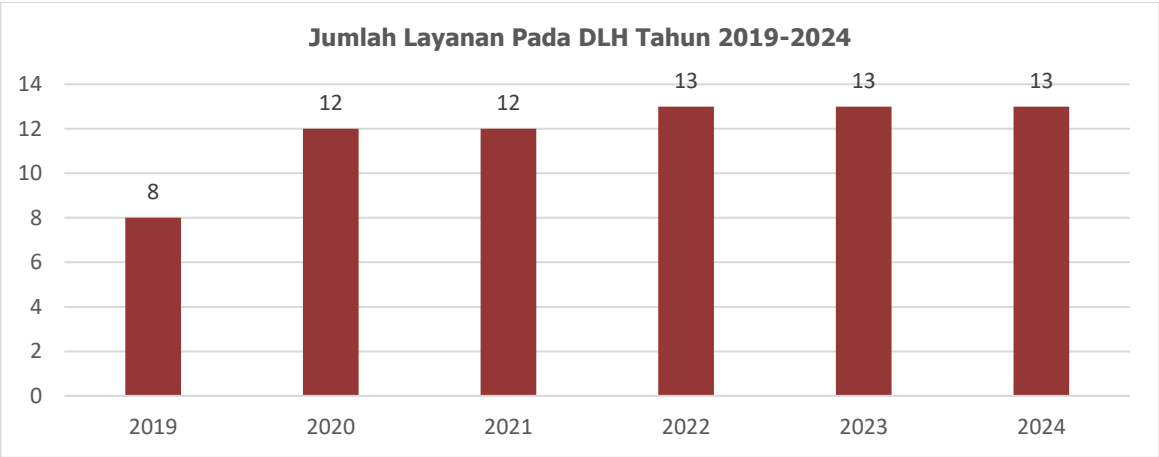
Gambar 2.12 Penghargaan Peringkat I SAKIP Tahun 2024

b. Nilai IKM

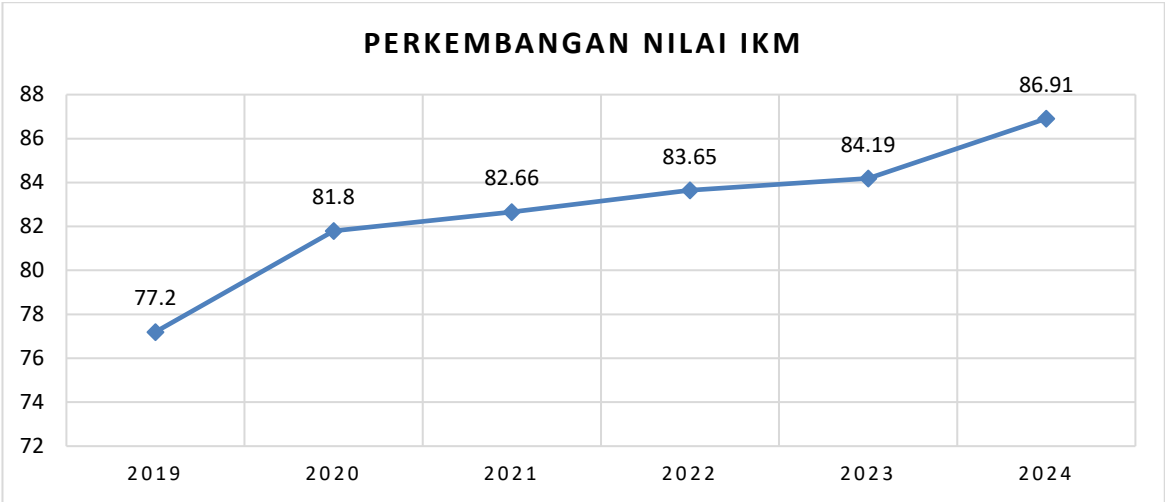
Pada Dinas Lingkungan Hidup, terjadi perubahan jumlah jenis pelayanan dari 8 layanan di Tahun 2019 menjadi 13 layanan di Tahun 2023 sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelayanannya. Jumlah layanan, populasi dan responden serta Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dapat dilihat melalui Gambar berikut ini.



Gambar 2.13 Populasi dan Responden SKM Tahun 2019-2024



Gambar 2.14 Jumlah Layanan Pada DLH Tahun 2019-2024



Gambar 2.15 Perkembangan Nilai IKM Tahun 2019-2024

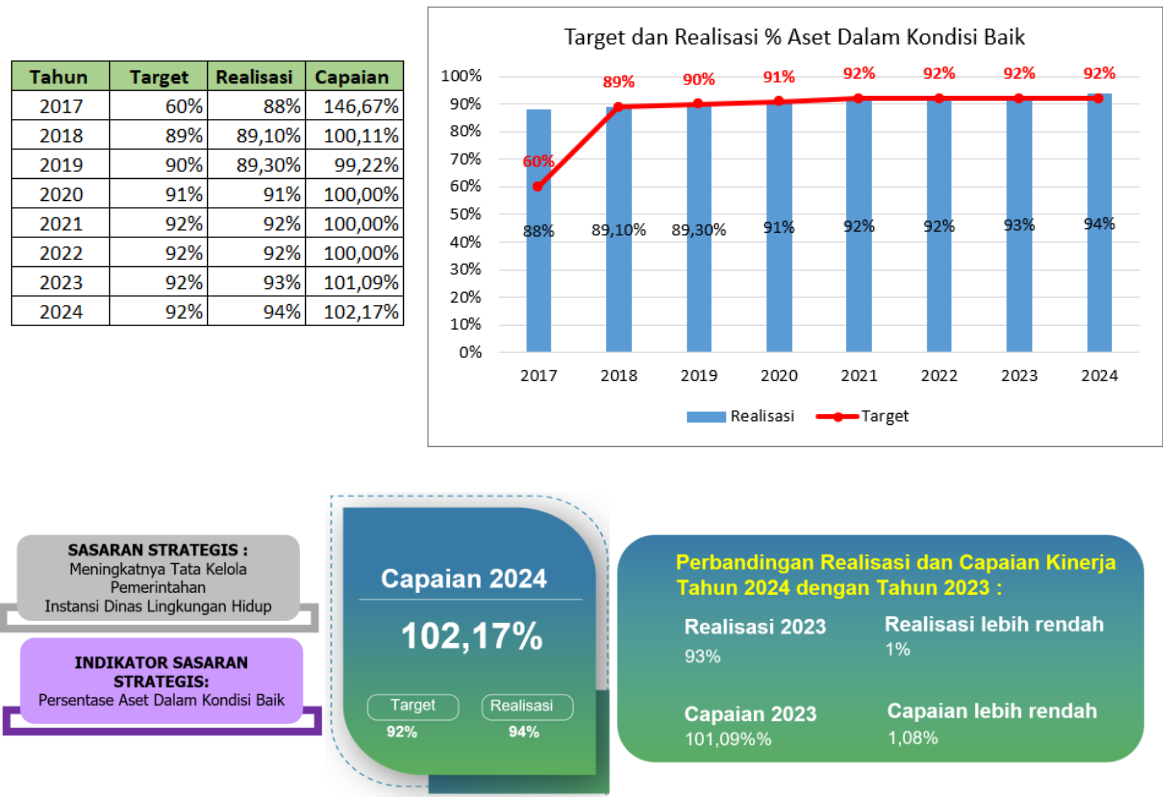
Berdasarkan gambar dan tabel tersebut, terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2019 hingga 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Info grafis berikut menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian Nilai IKM Tahun 2023 dan 2024.



Gambar 2.16 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

c. **Persentase Aset Dalam Kondisi Baik**

Capaian kinerja Persentase Aset Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 adalah 94%. Gambar berikut menunjukkan target dan capaian asset DLH Tahun 2017 s.d 2024 yang menunjukkan tren meningkat, yaitu dengan upaya pemeliharaan berkala, penambahan asset dan penghapusan/pemusnahan asset dalam kondisi rusak berat.



Gambar 2.17 Target dan Realisasi Capaian Persentase Aser dalam Kondisi Baik

Dari segi realisasi, persentase aset dalam kondisi baik **meningkat** 1% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 93% dan tahun 2024 sebesar 94%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase aset dalam kondisi baik meningkat sebesar 1,08% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101,09% dan pada tahun 2024 sebesar 102,17%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada tahun 2025, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain :

1. Aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha/Kegiatan harus lebih optimal untuk menekan tingkat pencemaran atau meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Optimalisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
4. Penyediaan sarana dan prasarana melalui skema pendanaan provinsi dan pusat.
5. Peningkatan kualitas lahan dengan persemaian, RTH dan Taman Kehati.
6. Penghargaan terhadap Masyarakat atau Pelaku Usaha/Kegiatan yang peduli lingkungan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berikut pemetaan permasalahan dan hambatan umum yang sering dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung:

Tabel 2.7 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Permasalahan	Hambatan
Masih terjadinya sumber pencemaran dari pembuangan limbah non domestik dari industri.	a. Buangan limbah non domestik dari industri yang tidak memenuhi baku mutu b. Rendahnya tingkat penataan dalam pengelolaan lingkungan c. Rendahnya penerapan dokumen lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan d. Rendahnya implementasi produksi bersih di industri
a. Rasio titik layanan pengangkutan sampah b. Rasio pengurangan dan penanganan sampah di sumber	a. Cenderung masih rendahnya rasio jumlah armada pengangkut sampah b. Relatif masih rendahnya pengurangan dan penanganan di sumber sampah c. Belum optimalnya dan masih rendahnya konsistensi partisipasi masyarakat d. Relatif masih rendahnya rasio sarana dan prasarana terhadap timbulan sampah
a. Masih kurangnya tutupan lahan (24.912 ha) b. Kritisnya kondisi Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang (Renstra DESDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023) c. Adanya katagori “terancam kepunahannya” terhadap kehati pada 14 komunitas ekosistem/lahan di Kabupaten Bandung (Kajian Kehati Kabupaten Bandung, 2014)	a. Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan hutan dan pengelolaan air bawah tanah. b. Belum optimalnya ketersediaan data RTH c. Belum tersedianya anggaran subkegiatan Pengelolaan RTH d. Masih terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW e. Cenderung masih terbatasnya kegiatan/ gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon f. Masih terjadinya penanaman yang tidak sesuai kaidah konservasi pada lahan di atas kemiringan 30 derajat. g. Masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum konsisten melaksanakan konservasi sumberdaya air sesuai dokumen lingkungan h. Masih belum optimalnya pelaksanaan berbasis rumah tangga/individu i. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam konservasi tanaman dan fauna endemik j. Belum masifnya upaya pengendalian perubahan iklim

Permasalahan	Hambatan
	k. Belum optimalnya media sinkronisasi program konservasi lingkungan
a. Belum meratanya kepedulian masyarakat yang terhadap lingkungan b. Belum optimalnya inovasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbasis kearifan lokal	a. Belum optimalnya edukasi dan akses informasi terkait PPLH b. Belum optimalnya sinkronisasi program lintas sector c. Belum optimalnya sistem reward & punishment bagi masyarakat terkait PPLH d. Belum optimalnya sosialisasi terkait PPLH kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan e. Belum semua desa/kelurahan menerbitkan Peraturan Desa/Kepala Kelurahan terkait PPLH berbasis potensi dan kearifan lokal
Belum optimalnya respon terhadap dampak lingkungan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah	a. Belum tersedianya sistem informasi lingkungan hidup b. Diperlukannya Pemutakhiran data DIKPLHD setiap tahun c. Belum tersedianya dokumen RPPLH d. Belum dilaksanakan evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari permasalahan dan hambatan diatas tentunya akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target Nasional, khususnya terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bandung dan Indikator Kinerja di Kementerian KLHK dan dalam target *SDG's*. Pada tingkat nasional, IKLH Kabupaten Bandung Tahun 2024 berada di bawah IKLH Rerata Nasional dengan selisih 13,68 poin dari Rerata IKLH Nasional sebesar 73,55 poin. Demikian juga pada Tingkat Provinsi Jawa Barat, IKLH Kabupaten Bandung berada dibawah rerata IKLH Jawa Barat dengan selisih 6,15 poin dari rerata IKLH Jawa Barat sebesar 66,02 poin. Kategori IKLH Nasional adalah Baik, sedangkan IKLH Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung berada pada kategori Cukup. Hal tersebut disebabkan dari 38 Provinsi di Indonesia, 33 provinsi (33,87%) antaranya memiliki IKLH terkatogori baik sehingga berkontribusi cukup besar pada capaian nilai IKLH Nasional, seperti diantaranya provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Sedangkan untuk Tingkat Jawa Barat, adanya kontribusi dari Nilai IKLH yang baik dari Kabupaten Ciamis dan Kuningan. Kontributor/tekanan pada kualitas lingkungan selain jumlah penduduk yang banyak pada suatu daerah, adalah banyaknya sumber pencemar dari kegiatan dan/atau usaha pada daerah tersebut.

2. Sampah Terkelola

Capaian kinerja Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 adalah 100,57% dari target sebesar 87,15% dan terealisasi sebesar 87,65%. Adapun capaian kinerja penanganan sampah hanya 62,18% dari target sebesar 59,31% dan terealisasi 36,88%, sedangkan capaian kinerja pengurangan sampah sebesar 182,36% dari target 27,84% dan terealisasi 50,77%. Hal tersebut disebabkan antara lain : belum memadainya ketersediaan sarana prasarana untuk pengangkutan sampah dan belum adanya tempat pemrosesan akhir sampah (TPPAS) lokal Kabupaten Bandung. Dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian persentase volume sampah yang terkelola tahun 2024 belum melebihi target akhir RPJMD-P dan Renstra-P yaitu sebesar 87,65% dari target akhir RENSTRA-P dan RPJMD-P sebesar 100% dan terealisasi 87,65% pada tahun 2024. Adapun untuk persentase pengurangan sampah Tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD-P dan Renstra-P yaitu sebesar 158,81% dari target 31,97% dan terealisasi 50,77%. Sedangkan persentase penanganan sampah, belum memenuhi target akhir RPJMD-P dan Renstra-P sebesar 54,21% dari target 68,03% dan terealisasi 36,88%. Pada tingkat provinsi Jawa Barat, rerata persentase volume sampah yang terkelola Tahun 2024 di Kabupaten Bandung berada di atas rerata Provinsi Jawa Barat dengan selisih 30,99% dari rerata Provinsi Jawa Barat. Demikian juga untuk persentase pengurangan sampah, realisasi Kabupaten Bandung lebih tinggi 37,74% dan persentase penanganan sampah lebih rendah 6,75% dibandingkan rerata-nya di provinsi Jawa Barat.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berikut rumusan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bandung:

Tabel 2.8 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
Penilaian dan Pembinaan dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan	100%	• Masih kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi penelaah dokumen lingkungan • Pemahaman pemrakarsa kegiatan atas persyaratan kelengkapan administrasi dokumen belum maksimal	• Adanya kegiatan Diklat/Bimtek dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan • Adanya kegiatan FGD yang melibatkan stake holder dan pemrakarsa
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	• Ketersediaan data dan informasi terkait lingkungan hidup masih belum memadai • Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah masih belum memadai	• Adanya program Satu Data sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan informasinya • Usulan penambahan anggaran
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	• Pengumpulan data dari stake holder • Sulitnya dalam mengakses sistem informasi lingkungan	• Surat Edaran dari Kementrian LHK tentang pedoman penyusunan DIKPLHD • Adanya sosialisasi dari KLHK dan DLH Provinsi terkait penyusunan DIKPLH
Pelaksanaan Sosialisasi Produksi Bersih dan <i>Self Assesment</i> Lokasi Penilaian Adipura	80%	• Partisipasi OPD terkait dalam pelaksanaan Adipura • Prilaku Masyarakat dalam pengelolaan	• Peraturan Menteri LHK RI Nomor p.79/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/19 Tentang ADIPURA • Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
		sampah dan pemanfaatan RTH	Pengelolaan Sampah, Sosialisasi dan Penanaman Pohon
Pengujian Kualitas air dan udara	100%	Tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya minat investasi di Kabupaten Bandung sehingga menimbulkan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan baik air, tanah dan udara.	Adanya program Citarum Harum yang memperkuat upaya PPLH dan memberikan dorongan yang kuat untuk seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam upaya PPLH khususnya di DAS Citarum
Pembinaan dan Pengawasan Usaha/kegiatan	73,7%	Banyaknya jumlah dan jenis usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik air, udara dan limbah B3, serta inkonsistensi para pelaku usaha kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pada aspek pengelolaan lingkungan.	- Adanya pengembangan upaya pengawasan sosial dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam PPLH - Terbitnya Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengubah beberapa kewenangan terkait penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya terkait pengurusan perizinan, serta beberapa pengaturan lainnya terkait pemantauan

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
			lingkungan, penegakan hukum dan pengaturan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	Lokasi usaha/kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sehingga menyulitkan upaya pengawasan langsung	Adanya layanan pengaduan masyarakat melalui pos pengaduan dengan media layanan berupa media sosial (whatsapp, instagram, twitter, dan facebook) email, website, sms center, call center, badega lingkungan dan melalui instansi kewilayahan (desa/kelurahan dan kecamatan)
Penegakan Hukum Lingkungan	100%	Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) dan pejabat teknis lainnya.	• Keberadaan Laboratorium Lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan • Banyaknya peluang kerjasama dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dari stakeholder lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, dan lembaga pemerintah lainnya.
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	100%	• Masih sulitnya melengkapi vegetasi tanaman endemik.	• Masih banyaknya potensi lokasi untuk Taman Kehati dan

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
		•Terbatasnya dukungan anggaran APBD sehingga kelengkapan infrastruktur dan vegetasi tidak memenuhi target waktu. •Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar Taman Kehati terhadap koleksi vegetasi endemik. •Cukup panjangnya prosedur birokrasi dalam pembangunan Tahura Kawasan Gunung Wayang	Kawasan Ekosistem Esensial lainnya. •Tersedianya dokumen perencanaan Tahura Kawasan Gunung Wayang. •Terbangunnya kemitraan dan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan pihak lain dalam mengembangkan Kawasan Ekosistem Esensial. •Terdapatnya kelompok masyarakat sebagai mitra taman kehati
Pengendalian Kerusakan Lingkungan/Luas area tertanami/Pengukuran Kualitas Lahan	100%	•Terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan hutan. •Masih luasnya lahan yang terkatagori kritis. •Masih banyaknya masyarakat yang melakukan penanaman tanaman sayur, tanaman yang memerlukan intensitas pengolahan tanah tinggi, dan/atau tanaman yang pada waktu panen membongkar tanah pada lahan dengan kemiringan di atas 30^o. •Masih banyaknya masyarakat yang melakukan perambahan di	•Terbitnya regulasi, berupa 3 (tiga) Instruksi Bupati terkait Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan •Adanya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan berbagai lembaga terkait KPKL, seperti Perhutani, PTPN VIII, dan PT. Indonesia Power Kamojang •Munculnya tren wisata yang disertai dengan kegiatan penanaman pohon. •Tersedianya pembibitan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan

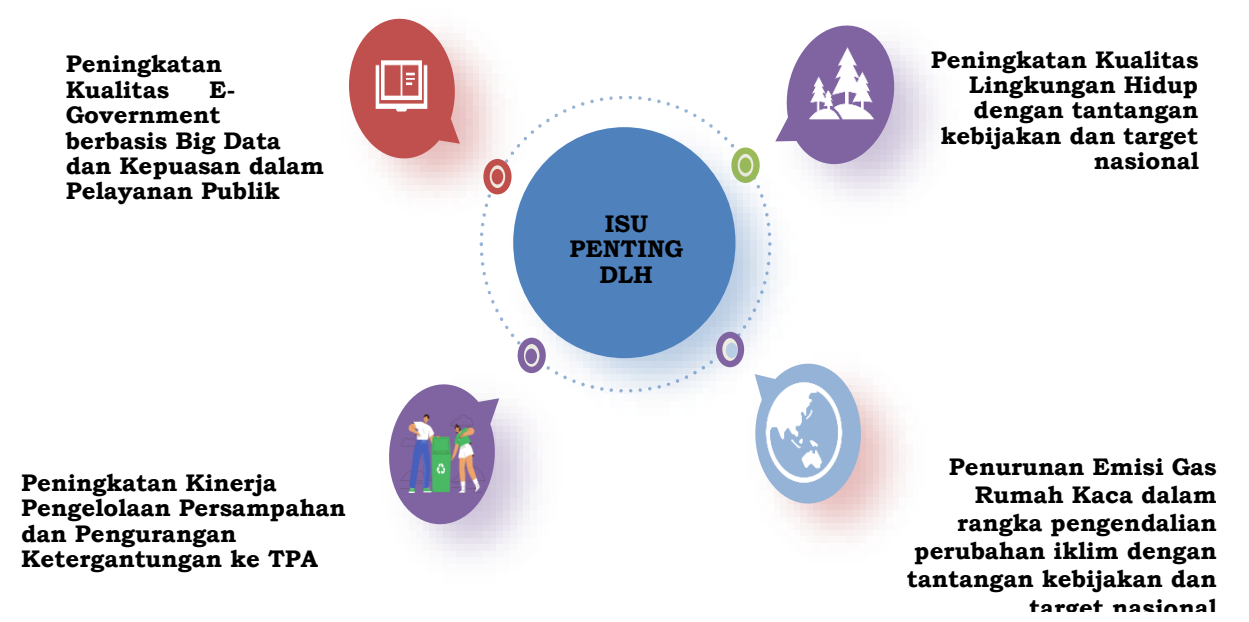
Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
		dalam maupun di luar kawasan hutan. • Masih kurangnya minat masyarakat dalam pembuatan pembibitan secara swadaya. • Cenderung lebih rendahnya minat masyarakat dalam menanam pohon kayu-kayuan.	masyarakat/komunitas. • Tersedianya komunitas dan Badega lingkungan yang terlibat dalam aksi penanaman dan pemeliharaan pohon. • Tingginya minat masyarakat dan pelaku usaha dalam aksi penanaman. • Terwujudnya desa konservasi tematik dengan tanaman tematik yang memiliki nilai konservasi dan ekonomi tinggi.
Peningkatan kapasitas dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 %	• Terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan pengumpulan masyarakat menjadi terhambat. Belum optimalnya dan masih rendahnya konsistensi tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kemitraan antar stakeholder, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam PPLH • Adanya pergantian Kepala Desa/Kepala Sekolah yang mengubah kebijakan PPLH. • Tidak tepatnya penunjukan Pendamping Lokal dan kader, sehingga	• Tersedianya pedoman pelaksanaan Program Kampung Bedas • Tersedianya Peraturan Bupati tentang Program Unggulan Strategis Kampung Bedas • Tersedianya peraturan yang memadai terkait Sekolah Adiwiyata • Tersedianya kader lingkungan yang sudah melakukan upaya PPLH secara mandiri. • Tersedianya potensi calon sekolah Adiwiyata, calon lokasi Kampung Bedas, dan calon lokasi Proklamasi. • Tersedianya desa yang memiliki potensi dan melakukan inovasi pengembangan desa berbudaya lingkungan • Diselenggarakannya bimtek untuk

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
		menghambat akselerasi kegiatan. • Terbatasnya alokasi anggaran untuk penguatan pendampingan Kampung Bedas pada tahun ke-2 dan ke-3. • Belum memadainya pemberian apresiasi terhadap masyarakat/ komunitas yang berprestasi dalam upaya PPLH.	fasilitator Pendamping Lokal. • Tersedianya dukungan/ kemitraan pengembangan program dari PD dan lembaga lain, termasuk perusahaan dan Perguruan Tinggi.
Penanganan dan Pengurangan Sampah	81,09 %	• Tren jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang terus meningkat sehingga potensi timbulan sampah cenderung bertambah • Luas wilayah yang cukup besar dengan topografi Kabupaten Bandung yang berbukit sehingga sulit di akses dan tidak terjangkau pelayanan • Jarak sumber sampah ke TPA yang cukup jauh memerlukan biaya yang cukup besar untuk operasional • Di kabupaten Bandung pembiayaan sampah hanya kisaran < 1 % dari total APBD	• Tersedianya fasilitas pengolahan sampah di desa sehingga mendorong terbentuknya pengelolaan sampah yang mandiri • Implementasi peraturan dalam melakukan pengelolaan sampah secara terdesentralisasi dari level pemerintah pusat hingga pemerintah desa • Rencana Pelaksanaan MOU dengan TPA Legok Nangka • Tersedianya sistem pengelolaan sampah skala kawasan yang bersumber dari non APBD • Tersedianya fasilitas pengolahan sampah di desa sehingga mendorong terbentuknya

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Capaian	Tantangan	Peluang
		• Optimalisasi teknologi tepat guna dalam mengelola sampah, khususnya sampah tercampur • Rasio daya Tampung TPS3R masih 10,7% • Target Jakstrada pada akhir periode Renstra mencapai 99,69% • Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah baik dalam pemilahan atau pengurangan di sumber • Perlu ada reformasi pengawasan dan penegakan hukum pelanggar pengelolaan sampah • Sektor Usaha/Kegiatan yang masih belum optimal menggunakan produk atau kemasan ramah lingkungan	pengelolaan sampah yang mandiri • Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan setiap tahun • Peningkatan peran serta masyarakat dengan mencetak kader/Kelompok pengelolaan sampah • Kampanye penggunaan produk ramah lingkungan

2.3.5 Formulasi isu-isu penting

Berikut formulasi isu-isu penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung :



Gambar 2.18 Isu-isu penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	Nilai AKIP	78	Poin	Rp50.414.805.966,88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	Nilai AKIP	78	Poin	Rp 50.421.724.051,00
	Kab. Bandung	Nilai IKM	78,25	Poin			Kab. Bandung	Nilai IKM	78,25	Poin	
	Kab. Bandung	Nilai BMD	92	%			Kab. Bandung	Nilai BMD	92	%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100	%	Rp81.138.133,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100	%	Rp 72.090.900,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp58.796.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 56.696.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp2.997.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 2.448.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp2.374.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 2.374.200,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp2.685.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 2.136.600,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp2.374.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1.825.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	Rp3.662.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	Rp 997.800,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Rp4.480.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Rp 2.962.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	Rp2.442.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	Rp 1.971.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100	Data	Rp1.326.233,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100	Data	Rp 680.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Rp30.942.295.269,88	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Rp 31.141.836.636,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	orang/bulan	Rp30.940.169.269,88	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	orang/bulan	Rp 31.140.836.636,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	28	Laporan	Rp2.126.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	28	Laporan	Rp 1.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	Rp1.152.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	Rp 0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp1.152.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp 0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	%	Rp241.395.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	%	Rp 236.228.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 5.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp157.095.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 157.095.400,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp5.496.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 5.496.700,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bandu ng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 10.000.000,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	Rp9.995.700,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	Rp 9.995.700,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Laporan	Rp1.720.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Laporan	Rp 1.720.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	Rp52.087.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	Rp 46.920.600,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp15.843.967.603,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp 18.193.715.715,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp799.994.003,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 799.994.003,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391	Laporan	Rp15.038.973.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391	Laporan	Rp 17.388.721.712,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	0	%	Rp518.302.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandu ng	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	0	%	Rp 480.352.400,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandu ng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Rp31.444.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandu ng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Rp 29.722.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122	Unit	Rp447.270.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122	Unit	Rp 427.910.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandu ng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	Rp29.620.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandu ng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	Rp 22.720.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandu ng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	Rp9.968.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandu ng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	Rp 0,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Bandu ng	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,11	Poin	Rp2.489.054.761,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Bandu ng	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,11	Poin	Rp 2.489.054.761,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Bandu ng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	Rp2.489.054.761,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Bandu ng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	Rp 2.489.054.761,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandu ng	Tersedianya insentif KDH WKDH	2	Orang/Bulan	Rp297.500.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandu ng	Tersedianya insentif KDH WKDH	2	Orang/Bulan	Rp 297.500.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	Rp297.500.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	Rp 297.500.000,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bandu ng	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS)	70	%	Rp219.410.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bandu ng	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS)	70	%	Rp 217.899.800,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH	100	%	Rp219.410.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH	100	%	Rp 217.899.800,00
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp126.518.500,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 126.296.500,00
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokumen	Rp92.891.500,00	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokumen	Rp 91.603.300,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bandu ng	Persentase lokasi titik pantau kualitas air	100	%	Rp1.575.368.860,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bandu ng	Persentase lokasi titik pantau kualitas air	100	%	Rp 1.484.220.560,00
		Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara	100	%			Kab. Bandu ng	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara	100	%	
		Indeks Kualitas Lahan	49,37	Poin			Kab. Bandu ng	Indeks Kualitas Lahan	49,37	Poin	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Kab. Bandu ng	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1	Dokumen	Rp322.289.800,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Kab. Bandu ng	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1	Dokumen	Rp 322.289.800,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	Dokumen	Rp252.289.800,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	Dokumen	Rp 252.289.800,00
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Bandu ng	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2743	Dokumen	Rp70.000.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Bandu ng	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2743	Dokumen	Rp 70.000.000,00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	34	Lokasi	Rp402.910.080,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	34	Lokasi	Rp 381.761.780,00
	Kab. Bandu ng	Jumlah lokasi titik pantau kualitas udara	27	Lokasi			Kab. Bandu ng	Jumlah lokasi titik pantau kualitas udara	27	Lokasi	
	Kab. Bandu ng	Jumlah Lokasi Pencemaran yang Ditanggulangi	1	Lokasi			Kab. Bandu ng	Jumlah Lokasi Pencemaran yang Ditanggulangi	1	Lokasi	
	Kab. Bandu ng	Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan					Kab. Bandu ng	Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	2	Laporan	Rp285.397.900,00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	2	Laporan	Rp 285.397.900,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bandung	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1	Lokasi	Rp117.512.180,00	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bandung	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1	Lokasi	Rp 96.363.880,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah area tertanami (ha)	4	Ha	Rp850.168.980,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah area tertanami (ha)	4	Ha	Rp 850.168.980,00
Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Bandung	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	Ha	Rp850.168.980,00	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Bandung	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	Ha	Rp 850.168.980,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Kab. Bandung	Persentase pengembangan Taman Kehati	87,50 %	%	Rp320.874.809,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Kab. Bandung	Persentase pengembangan Taman Kehati	87,50 %	%	Rp 320.874.809,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Persentase vegetasi tertanam	90,00 %	%		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Persentase vegetasi tertanam	90,00 %	%	Rp 320.874.809,00
	Kab. Bandung	Persentase infrastruktur terbangun		%			Kab. Bandung	Persentase infrastruktur terbangun		%	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Bandung	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit	Rp60.152.000,00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Bandung	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit	Rp 60.152.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bandung	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,5	Ha	Rp260.722.809,00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bandung	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,5	Ha	Rp 260.722.809,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Bandung	Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi	100	%	Rp24.592.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Bandung	Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi	100	%	Rp 24.592.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1	%	Rp24.592.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1	%	Rp 24.592.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Bandung	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40	Dokumen	Rp9.656.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Bandung	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40	Dokumen	Rp 9.656.000,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bandung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110	Badan Usaha	Rp14.936.000,00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bandung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110	Badan Usaha	Rp 14.936.000,00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Bandung	Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial	100	%	Rp221.385.600,00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Bandung	Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial	100	%	Rp 221.385.600,00
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Bandung	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	1	Laporan	Rp221.385.600,00	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Bandung	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	1	Laporan	Rp 221.385.600,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	Rp221.385.600,00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	Rp 221.385.600,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Bandu ng	Persentase Desa Berbudaya Lingkungan	62,5	%	Rp67.458.039,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Bandu ng	Persentase Desa Berbudaya Lingkungan	62,5	%	Rp 67.458.039,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	10	Laporan	Rp67.458.039,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	10	Laporan	Rp 67.458.039,00
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bandu ng	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	Rp67.458.039,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bandu ng	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	Rp 67.458.039,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Bandu ng	Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	52	%	Rp9.287.200,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Bandu ng	Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	52	%	Rp 9.287.200,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	80	Dokumen	Rp9.287.200,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	80	Dokumen	Rp 9.287.200,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bandu ng	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80	Entitas	Rp9.287.200,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bandu ng	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80	Entitas	Rp 9.287.200,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bandu ng	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100	%	Rp69.856.600,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bandu ng	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100	%	Rp 69.856.600,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bandu ng	Jumlah laporan penanganan pengaduan	1	Laporan	Rp69.856.600,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bandu ng	Jumlah laporan penanganan pengaduan	1	Laporan	Rp 69.856.600,00
	Kab. Bandu ng	Jumlah laporan hasil penegakan hukum	1	laporan			Kab. Bandu ng	Jumlah laporan hasil penegakan hukum	1	laporan	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
(PPLH) Kabupaten/Kota						(PPLH) Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50	Pengaduan	Rp21.181.600,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50	Pengaduan	Rp 21.181.600,00
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bandung	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	Rp48.675.000,00	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bandung	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	Rp 48.675.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bandung	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42	%	Rp63.726.115.978,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bandung	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42	%	Rp 59.155.287.977,00
Pengelolaan Sampah	Kab. Bandung	Persentase Penanganan Volume Sampah	63,7	%	Rp63.726.115.978,00	Pengelolaan Sampah	Kab. Bandung	Persentase Penanganan Volume Sampah	63,7	%	Rp 59.155.287.977,00
	Kab. Bandung	Persentase Pengurangan Volume Sampah	29,72	%			Kab. Bandung	Persentase Pengurangan Volume Sampah	29,72	%	
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Bandung	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20	Kelompok	Rp432.705.730,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Bandung	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20	Kelompok	Rp 432.705.730,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	Dokumen	Rp 0,00
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Bandu ng	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	Dokumen	Rp23.625.000,00	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Bandu ng	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	Dokumen	Rp 23.625.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8	Unit	Rp20.838.108.419,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8	Unit	Rp 17.605.364.419,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	Rp18.440.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Bandu ng	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	Rp 18.440.000,00

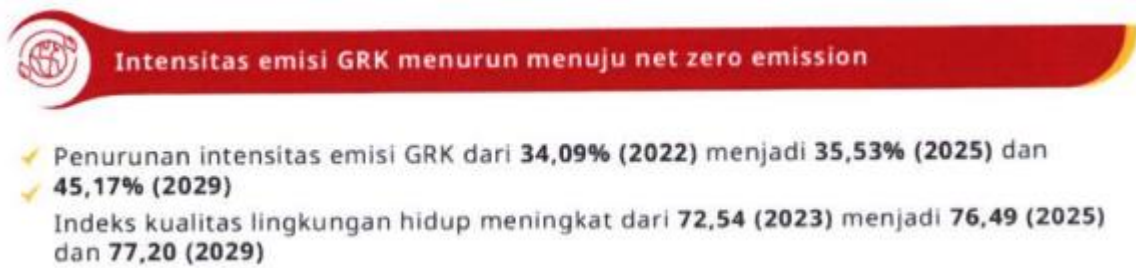
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	URAIAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Kebutuhan Dana (Rp)
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Bandu ng	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4380 0	Ton	Rp41.750.554.257,00	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Bandu ng	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4380 0	Ton	Rp 40.412.470.256,00
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Bandu ng	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 0	Ton	Rp662.682.572,00	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Bandu ng	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 0	Ton	Rp 662.682.572,00

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional****3.1.1 Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029**

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan yang disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks lingkungan hidup, RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya keberlanjutan ekologi sebagai fondasi pembangunan nasional yang tangguh dan inklusif.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk memastikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. selain itu, arah kebilakan ini juga akan memastikan penataan ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota; (c) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (d) Peningkatan kualitas lahan; (e) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (f) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah radioaktif; (g) penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan dan penataan ruang; serta (h) penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 terkait dengan Urusan Lingkungan Hidup tergambar pada Pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025-2029

3.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 tahap IV serta penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perumusan visi RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 ini juga mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2019-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, isi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Dari kelima misi tersebut, Misi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi”**. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan. Berdasarkan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan dan menuangkan dalam Tujuan dan Sasaran DLH 2025-2026:



Gambar 3. 2 Logical Frame Work Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung capaian sasaran pada RPJMD 2025-2029 adalah “Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, berikut rumusan Tujuan, Sasaran beserta Indikator Kinerja DLH Tahun 2025-2029.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KET
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,73	Poin
			Penurunan Emisi GRK	456.335,50	Ton Co2eq
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	61,20	Poin
			Indeks Kualitas Air	65,64	Poin
			Indeks Kualitas Lahan	65,11	Poin
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah	17,87	Persen
			Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh	44,51	Persen

			Pengumpulan Sampah		
--	--	--	--------------------	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ayaupun dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Berikut penjelasan terkait program kegiatan dalam pencapaian Renja Perubahan 2025:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:
 - Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (GAP) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.



Gambar 3. 3 Posisi Pilar terkait Lingkungan Hidup dalam TPB

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kondisi lingkungan (biosphere) merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut tabel yang memetakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan terhadap penentuan Program yang diampu:

Tabel 3.2 Rumusan Program berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No TPB	Tujuan TPB	Indikator TPB	Indikator Renja DLH	Rencana Program DLH
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Pada level Tujuan terdapat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Sasaran Indeks Kualitas Air	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

No TPB	Tujuan TPB	Indikator TPB	Indikator Renja DLH	Rencana Program DLH
				(MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 3. Program Pengelolaan Pengaduan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Pada Level Sasaran DLH Terdapat indikator kinerja Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah dan Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Jumlah Kota Hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste dan di Kawasan perkotaan	Terdapat Indikator Indeks Kualitas Lahan atau Ruang Terbuka Hijau	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No TPB	Tujuan TPB	Indikator TPB	Indikator Renja DLH	Rencana Program DLH
		metropolitan		
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah Timbunan Sampah Yang di daur Ulang	Terdapat dalam indikator sub kegiatan Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah
		Jumlah Limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industry)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap perizinan berusaha (aspek lingkungan) dan Sertifikat Layak Operasi	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH
15	Melindungi , Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghenti	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Persentase Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No TPB	Tujuan TPB	Indikator TPB	Indikator Renja DLH	Rencana Program DLH
	kan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			

- Rumusan Program untuk Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.3 Rumusan Program berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi Terkait	Sasaran	Indikator Sasaran dan Indikator lainnya (IKD)	Program Renja-P DLH
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah dan 4. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat

Misi Terkait	Sasaran	Indikator Sasaran dan Indikator lainnya (IKD)	Program Renja-P DLH
			Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang 6. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup 8. Program Pengelolaan Pengaduan 9. Program Pengelolaan Persampahan

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja DLH Tahun 2025 melaksanakan 10 (sepuluh) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan.

c. Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Perubahan Tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00				85.713.132.781,00	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00				85.713.132.781,00	
2	1 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00				85.713.132.781,00	
2	1 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD	78,00 78,25 92,00 Poin Poin %	78,00 78,25 92,00 Poin Poin %	47.373.236.146,00	50.458.710.281,88	52.910.778.811,88				43.212.036.268,00
2	1 1	0 1	2. 01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 Persen	100 Persen	107.000.000,00	84.876.500,00	84.876.500,00				61.000.000,00
2	1 1	0 1	2. 01	00 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	61.000.000,00	58.796.100,00	56.696.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
2	1 1	0 1	2. 01	00 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000,00	3.573.000,00	2.448.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00
2	1 1	0 1	2. 01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000,00	3.549.600,00	2.374.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00
2	1 1	0 1	2. 01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000,00	3.261.600,00	2.136.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00
2	1 1	0 1	2. 01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000,00	3.549.600,00	1.825.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
2	1	0	2.	00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	3.662.800,00	997.800,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00	
2	1	0	2.	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	4.480.000,00	2.962.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00	
2	1	0	2.	00	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.442.000,00	1.971.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	
2	1	0	2.	00	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	100 Data	5.000.000,00	1.561.800,00	680.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00		
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	28.753.592.785,00	30.944.255.269,88	30.944.255.269,88				27.716.341.268,00		
2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	28.743.592.785,00	30.940.169.269,88	31.140.836.635,88	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			27.706.341.268,00		
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	28 Laporan	28 Laporan	10.000.000,00	4.086.000,00	1.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	9.447.300,00	9.447.300,00			10.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.447.300,00	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	100 Persen	349.445.000,00	268.406.048,00	268.406.048,00			77.765.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	170.828.300,00	157.151.648,00	157.095.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	1	1	06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	5.496.700,00	5.496.700,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	1	1	06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	1	1	06	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.995.700,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
	1	1	06	08		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	8.250.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.250.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	1	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan	25 Laporan	25 Laporan	139.866.700,00	79.037.700,00	46.920.600,00	PENDAP ATAN ASLI			24.015.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						DAERAH (PAD)				
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	15.846.873.600,00	15.846.867.603,00	15.846.867.603,00				13.844.480.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	799.994.003,00	799.994.003,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391 Laporan	391 Laporan	15.041.873.600,00	15.041.873.600,00	17.388.721.712,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			13.539.480.000,00	
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	519.770.000,00	518.302.800,00	518.302.800,00				292.450.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
					Urusan Pemerintahan Daerah										
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	32.500.000,00	31.444.800,00	29.722.400,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		32.500.000,00	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122 Unit	122 Unit	447.270.000,00	447.270.000,00	427.910.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		219.950.000,00	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	30.000.000,00	29.620.000,00	22.720.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	9.968.000,00	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya insentif KDH WKDH	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	297.500.000,00	297.500.000,00	297.500.000,00			10.000.000,00	
2	1	0	2.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	297.500.000,00	297.500.000,00	297.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	
2	1	0			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS)	70 %	70 %	276.000.000,00	239.018.500,00	217.899.800,00			276.000.000,00	
2	1	0	2.		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH	100 %	100 %	276.000.000,00	239.018.500,00	239.018.500,00			276.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine ra	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	0	2.	00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokume n	1 Dokume n	246.000.000,00	142.812.000,00	126.296.500,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		246.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota										
						jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokume n	1 Dokume n	30.000.000,00	96.206.500,00	91.603.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGA N HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	100 49,37 % Poin	100 49,37 % Poin	1.253.434.260,00	1.658.197.860,00	1.554.220.560,00			600.095.980,00	
2	1	0	2.		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1 Dokume n	1 Dokume n	341.250.200,00	322.289.800,00	322.289.800,00			170.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	0	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokume n	5 Dokume n	271.250.200,00	252.289.800,00	252.289.800,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	
2	1	0	2.		Penanggulan gan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan	1 Dokume n Perubah an BSO Dokume n	1 Dokume n Perubah an BSO Dokume n	487.187.180,00	425.739.080,00	425.739.080,00			350.035.480,00	
2	1	0	2.	00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	302.796.900,00	285.397.900,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	1 Lokasi	137.187.180,00	122.942.180,00	96.363.880,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.480,00	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah area tertanami (ha)	4 ha	4 ha	424.996.880,00	910.168.980,00	910.168.980,00			80.060.500,00	
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi										
						luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	4 Ha	424.996.880,00	910.168.980,00	850.168.980,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.060.500,00	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengembangan Taman Kehati	87,5 %	87,5 %	469.190.000,00	391.949.300,00	320.874.809,00			469.190.000,00	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun	Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur	Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur	469.190.000,00	391.949.300,00	391.949.300,00			469.190.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							terbangun 90 %	terbangun 90 %							
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18.5 Ha	18.5 Ha	400.000.000,00	331.797.300,00	260.722.809,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00	
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan										
						Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	69.190.000,00	60.152.000,00	60.152.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69.190.000,00	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi	100 %	100 %	103.983.600,00	62.987.600,00	24.592.000,00			81.738.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	0	2.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	103.983.600,00	62.987.600,00	62.987.600,00			81.738.000,00	
2	1	0	2.	00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH										
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen	40 Dokumen	23.006.000,00	13.056.000,00	9.656.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		23.006.000,00	
2	1	0	2.	00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Badan Usaha	110 Badan Usaha	80.977.600,00	49.931.600,00	14.936.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		58.732.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Targ et Capaian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
2	1	0			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKA T HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial	100 %	100 %	242.025.600, 00	242.025.600, 00	221.385.600, 00			242.025.600, 00
2	1	0	2.		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	242.025.600, 00	242.025.600, 00	242.025.600, 00			242.025.600, 00
2	1	0	2.	00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan	1 Dokume n	1 Dokume n	242.025.600, 00	242.025.600, 00	221.385.600, 00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		242.025.600, 00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan									
2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa Berbudaya Lingkungan	62,5 %	62,5 %	70.967.839,00	67.458.039,00	67.458.039,00			70.967.839,00	
2	1 1	0 8	2. 01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	10 Laporan	10 Laporan	70.967.839,00	67.458.039,00	67.458.039,00			70.967.839,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	0	2.	00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokume n	4 Dokume n	70.967.839,0 0	67.458.039,0 0	67.458.039,0 0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.967.839,0 0	
2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang diperoleh	52 %	52 %	50.000.000,0 0	28.401.500,0 0	9.287.200,00			50.000.000,0 0	
2	1	0	2.		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang diperoleh	80 Pengghar gaan	80 Pengghar gaan	50.000.000,0 0	28.401.500,0 0	28.401.500,0 0			50.000.000,0 0	
2	1	0	2.	00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang Dinilai	80 Entitas	80 Entitas	50.000.000,0 0	28.401.500,0 0	9.287.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,0 0	

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							Kinerjanya dalam rangka PPLH									
2	1	1				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100 %	100 %	160.000.000,00	94.251.600,00	69.856.600,00				160.000.000,00
2	1	1	2.			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum	2 Laporan	2 Laporan	160.000.000,00	94.251.600,00	94.251.600,00				160.000.000,00
2	1	1	2.	00	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 Pengaduan	50 Pengaduan	60.000.000,00	29.261.600,00	21.181.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
2	1	1	2.	00	06	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara	20 Perkara	100.000.000,00	64.990.000,00	48.675.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42 %	93,42 %	63.620.561.726,00	64.299.661.208,00	59.155.287.977,12				40.551.079.094,00
2	1	1	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah	29,72 Persen 63,7 Persen	29,72 Persen 63,7 Persen	63.620.561.726,00	64.299.661.208,00	64.299.661.208,00				40.551.079.094,00
2	1	1	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompo k	20 Kelompo k	454.869.732,00	578.900.732,00	432.705.730,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			132.910.500,00
2	1	1	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Dokume n	2 Dokume n	10.000.000,00	0,00	0,00	PENDAP ATAN ASLI			10.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada						DAERAH (PAD)				
2	1	1	2.	00		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	8 Unit	25.295.298.319,00	20.838.108.419,00	17.605.364.419,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah		2.547.774.919,00		
2	1	1	2.	00		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota										
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan	1 Dokume n	1 Dokume n	10.000.000,00	22.050.000,00	18.440.000,00	PENDAP ATAN ASLI		10.000.000,00		

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan					DAERAH (PAD)				
2	1	1	2.	00		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional										20
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	43800 Ton	43800 Ton	34.832.497.675,00	42.088.720.257,00	40.412.470.256,12	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		34.832.497.675,00	
2	1	1	2.	00	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan										01	21
							jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	
					UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah					113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00			85.713.132.781,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00			85.713.132.781,00	
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00			85.713.132.781,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42 %	93,42 %	63.620.561.726,00	64.299.661.208,00	59.155.287.977,12			40.551.079.094,00	
2	1	1	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah	29,72 Persen 63,7 Persen	29,72 Persen 63,7 Persen	63.620.561.726,00	64.299.661.208,00	64.299.661.208,00			40.551.079.094,00	
2	1	1	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah										
						Jumlah sampah yang terdaur ulang	33000 Ton	33000 Ton	3.007.896.000,00	748.256.800,00	662.682.572,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		3.007.896.000,00	
					UPTD Laboratorium Lingkungan				113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00			85.713.132.781,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00			85.713.132.781,00	
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				113.619.399.171,00	117.542.661.488,88	114.551.641.397,00			85.713.132.781,00	
2	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai IKM Nilai BMD	78,25 92 Poin %	78,25 92 Poin %	47.373.236.146,00	50.458.710.281,88	52.910.778.811,88			43.212.036.268,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
					DAERAH KABUPATEN /KOTA											
2	11	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,11 Poin	3,11 Poin	1.489.054.761,00	2.489.054.761,00	2.489.054.761,00				1.200.000.000,00	
2	11	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.489.054.761,00	2.489.054.761,00	2.489.054.761,00	Pendapat an dari BLUD Penarika n Sisa Lebih Perhitun gan Anggara n BLUD			1.200.000.000,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGA N HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	100 49,37 % Poin	100 49,37 % Poin	1.253.434.260,00	1.658.197.860,00	1.554.220.560,00				600.095.980,00	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1 Dokume n	1 Dokume n	341.250.200,00	322.289.800,00	322.289.800,00				170.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
					Hidup Kabupaten/Kota												
2	1	0	2.	00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota												
	1	3	01	15		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2743 Dokume n	2743 Dokume n	70.000.000,0 0	70.000.000,0 0	70.000.000,0 0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000,0 0		
J U M L A H									113.619.399. 171,00	117.542.661. 488,88	114.551.641. 397,00				85.713.132. 781,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sampah. Rincian alokasi anggaran per program/kegiatan akan dijabarkan dalam Tabel 4.1, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Prioritas pendanaan akan diberikan pada kegiatan yang bersifat inovatif, berbasis bukti, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.09 2
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.09 2
2	1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.09 2
2	1 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD	78,00 78,25 92,00 Poin Poin %	78,00 78,25 92,00 Poin Poin %	50.458.710.281,88	52.910.778.811,88	2.452.068.53 0
2	1 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 Persen	100 Persen	84.876.500,00	84.876.500,00	-
2	1 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	58.796.100,00	56.696.100,00	- 2.100.000
2	1 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.573.000,00	2.448.000,00	- 1.125.000
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-
	1	1	1	3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.549.600,00	2.374.200,00	- 1.175.400
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-
	1	1	1	4		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.261.600,00	2.136.600,00	- 1.125.000
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-
	1	1	1	5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.549.600,00	1.825.200,00	- 1.724.400
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-
	1	1	1	6							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.662.800,00	997.800,00	- 2.665.000
2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-
	1	1	1	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.480.000,00	2.962.000,00	- 1.518.000
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						-
	1	1	1	8		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.442.000,00	1.971.000,00	- 471.000
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						-
	1	1	1	9		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	100 Data	1.561.800,00	680.000,00	- 881.800
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	30.944.255.269,88	30.944.255.269,88	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						-
	1	1	2	1							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	30.940.169.269,88	31.140.836.635,88	200.667.366
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						-
	1	1	2	7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan	28 Laporan	4.086.000,00	1.000.000,00	- 3.086.000
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9.447.300,00	9.447.300,00	-
2	1	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						-
	1	1	5	5		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	9.447.300,00	0,00	- 9.447.300
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	100 Persen	268.406.048,00	268.406.048,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	1	1	6	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	
	1	1	6	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	157.151.648,00	157.095.400,00	- 56.248
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					-	
	1	1	6	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.496.700,00	5.496.700,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					-	
	1	1	6	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					-	
	1	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	9.995.700,00	- 4.300
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu					-	
	1	1	6	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	1.720.000,00	1.720.000,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	
	1	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	79.037.700,00	46.920.600,00	- 32.117.100

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	15.846.867.603,00	15.846.867.603,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-
	1	1	8	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						-
	1	1	8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	799.994.003,00	799.994.003,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-
	1	1	8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391 Laporan	391 Laporan	15.041.873.600,00	17.388.721.712,00	2.346.848.11 2
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	518.302.800,00	518.302.800,00	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-
	1	1	9	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	31.444.800,00	29.722.400,00	- 1.722.400
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-
	1	1	9	2							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122 Unit	122 Unit	447.270.000,00	427.910.000,00	- 19.360.000
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-
	1	1	9	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	29.620.000,00	22.720.000,00	- 6.900.000
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						-
	1	1	9	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	9.968.000,00	0,00	- 9.968.000
2	1	0	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya insentif KDH WKDH	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	297.500.000,00	297.500.000,00	-
2	1	0	2.1	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						-
	1	1	1	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	297.500.000,00	297.500.000,00	-
2	1	0			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS)	70 %	70 %	239.018.500,00	217.899.800,00	- 21.118.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH	100 %	100 %	239.018.500,00	239.018.500,00	-
2	1	0	2.0	000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						-
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	142.812.000,00	126.296.500,00	- 16.515.500
2	1	0	2.0	000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						-
						jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	96.206.500,00	91.603.300,00	- 4.603.200
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	100 49,37 % Poin	100 49,37 % Poin	1.658.197.860,00	1.554.220.560,00	- 103.977.300
2	1	0	2.0		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1 Dokumen	1 Dokumen	322.289.800,00	322.289.800,00	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	252.289.800,00	252.289.800,00	-
1	1	3	1	2							-
2	1	0	2.0		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan	1 Dokumen Perubahan BSO Dokumen	1 Dokumen Perubahan BSO Dokumen	425.739.080,00	425.739.080,00	-
1	1	3	2								-
2	1	0	2.0	000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	302.796.900,00	285.397.900,00	-
1	1	3	2	1							17.399.000
2	1	0	2.0	000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	1 Lokasi	122.942.180,00	96.363.880,00	-
1	1	3	2	2							26.578.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah area tertanami (ha)	4 ha	4 ha	910.168.980,00	910.168.980,00	-
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan rehabilitasi						-
				9		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	4 Ha	910.168.980,00	850.168.980,00	- 60.000.000
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase pengembangan Taman Kehati	87,5 %	87,5 %	391.949.300,00	320.874.809,00	- 71.074.491
2	1	0	2.0		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun	Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur terbangun 90 %	Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur terbangun 90 %	391.949.300,00	391.949.300,00	-
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						-
				4		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18.5 Ha	18.5 Ha	331.797.300,00	260.722.809,00	- 71.074.491
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan						-
				9		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	60.152.000,00	60.152.000,00	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi	100 %	100 %	62.987.600,00	24.592.000,00	- 38.395.600
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	62.987.600,00	62.987.600,00	-
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						-
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen	40 Dokumen	13.056.000,00	9.656.000,00	- 3.400.000
2	1	0	2.0	000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						-
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Badan Usaha	110 Badan Usaha	49.931.600,00	14.936.000,00	- 34.995.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial	100 %	100 %	242.025.600,00	221.385.600,00	- 20.640.000
2	1	0	2.0		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	242.025.600,00	242.025.600,00	-
2	1	0	2.0	000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						-
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen	242.025.600,00	221.385.600,00	- 20.640.000
2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase Desa Berbudaya Lingkungan	62,5 %	62,5 %	67.458.039,00	67.458.039,00	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
					HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	10 Laporan	10 Laporan	67.458.039,00	67.458.039,00	-
2	1	0	2.0	000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						-
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	67.458.039,00	67.458.039,00	-
2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	52 %	52 %	28.401.500,00	9.287.200,00	- 19.114.300
2	1	0	2.0		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang diperoleh	80 Pengghargaan	80 Pengghargaan	28.401.500,00	28.401.500,00	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0	000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						-
1	1	9	1	1		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80 Entitas	80 Entitas	28.401.500,00	9.287.200,00	- 19.114.300
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100 %	100 %	94.251.600,00	69.856.600,00	- 24.395.000
2	1	1	2.0		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum	2 Laporan	2 Laporan	94.251.600,00	94.251.600,00	-
2	1	1	2.0	000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						-
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 Pengaduan	50 Pengaduan	29.261.600,00	21.181.600,00	- 8.080.000
2	1	1	2.0	000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						-
1	1	0	1	6							-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara	20 Perkara	64.990.000,00	48.675.000,00	- 16.315.000
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42 %	93,42 %	64.299.661.208,00	59.155.287.977,12	- 5.144.373.23 1
2	1	1	2.0 1		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah	29,72 Persen 63,7 Persen	29,72 Persen 63,7 Persen	64.299.661.208,00	64.299.661.208,00	-
2	1	1	2.0 1	000 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						-
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	20 Kelompok	578.900.732,00	432.705.730,00	- 146.195.002
2	1	1	2.0 1	000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	-
2	1	1	2.0	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						-
	1	1	1	7		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	8 Unit	20.838.108.419,00	17.605.364.419,00	- 3.232.744.000
2	1	1	2.0	000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						-
	1	1	1	8		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.050.000,00	18.440.000,00	- 3.610.000
2	1	1	2.0	002	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						-
	1	1	1	0							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	43800 Ton	43800 Ton	42.088.720.257,00	40.412.470.256,12	- 1.676.250.00 1
2	1	1	2.0	002	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan						-
	1	1	1	1		jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.625.000,00	23.625.000,00	-
					UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.09 2
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.09 2
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.09 2
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42 %	93,42 %	64.299.661.208,00	59.155.287.977,12	- 5.144.373.23 1
2	1	1	2.0		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah	29,72 Persen 63,7 Persen	29,72 Persen 63,7 Persen	64.299.661.208,00	64.299.661.208,00	-
2	1	1	2.0	001	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah						-
	1	1	1	9							-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
						Jumlah sampah yang terdaur ulang	33000 Ton	33000 Ton	748.256.800,00	662.682.572,00	- 85.574.228
					UPTD Laboratorium Lingkungan				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.092
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.092
2	1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				117.542.661.488,88	114.551.641.397,00	- 2.991.020.092
2	1 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai BMD	78,25 92 Poin %	78,25 92 Poin %	50.458.710.281,88	52.910.778.811,88	2.452.068.530
2	1 1	0 1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,11 Poin	3,11 Poin	2.489.054.761,00	2.489.054.761,00	-
2	1 1	0 1	2.1 0	000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						-
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.489.054.761,00	2.489.054.761,00	-
2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	100 49,37 % Poin	100 49,37 % Poin	1.658.197.860,00	1.554.220.560,00	- 103.977.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025				
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
2	1	0	2.0		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1 Dokumen	1 Dokumen	322.289.800,00	322.289.800,00	-
2	1	0	2.0	001	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						-
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2743 Dokumen	2743 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	-
J U M L A H									117.542.661.488,8 8	114.551.641.397,0 0	- 2.991.020.09 2

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
- b. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 terhadap target Renja 2024 telah terpenuhi, namun untuk indikator kinerja Persentase Volume Sampah yang Terkelola dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdapat saran/langkah di masa mendatang dengan upaya sebagai berikut:

- a. Saran/Langkah di masa mendatang untuk peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 1) Peningkatan kompetensi dan kapasitas laboratorium lingkungan sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan/penegakan hukum lingkungan;
 - 2) Peningkatan Kerjasama dengan stake holder terkait dalam pengendalian pencemaran lingkungan (LSM, Lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi pemerintahan lainnya di Tingkat Kabupaten/Kota yang berbatasan, pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup);
 - 3) Peningkatan peran serta komunitas dalam aksi penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - 4) Peningkatan kapasitas SDM DLH melalui Bimtek KLHS, RPPLH, AMDAL, Produksi Bersih, serta Bimtek Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 5) Peningkatan kesadaran pelaku usaha/kegiatan, pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui sosialisasi, bimtek, lokakarya, saresehan dll;
 - 6) Memberikan reward dan punishment bagi pihak-pihak yang telah berkontribusi tinggi pada Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Saran/Langkah di masa mendatang untuk peningkatan Persentase Volume Sampah yang Terkelola:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah, khususnya pada pengurangan sampah;
- 2) Peningkatan jumlah armada (sesuai dengan jumlah timbulan sampah) dan penyediaan lokasi Tempat Pengolahan dan Pembuangan Akhir Sampah skala Kabupaten Bandung;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) Optimalisasi pengelolaan sampah mandiri di setiap desa dan kawasan tertentu (komersial, perumahan, dan lain-lain) melalui penyediaan sarana-prasarana dan SDM yang memadai dan kompeten;
- 5) Pendekatan kebijakan berupa penetapan Peraturan Bupati, Instruksi Bupati atau surat edaran dalam pengelolaan sampah.

Soreang, Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

ASEP KUSUMAH

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

**Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Renja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidakkesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan masyarakat	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidakkesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
	dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	√			

Soreang, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG



ASEP KUSUMAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003